

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Evaluasi

a. Definisi Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*, adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, sebagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serbagi manan manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai (Wrightstone, 1956)

Sudijono (1996) mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai tujuan atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya.

Stark dan Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi yang hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam banyak situasi pendidikan.

Hasil yang diperoleh dari suatu program pembelajaran bisa banyak dan multi dimensi. Ada yang terkait dengan tujuan ada yang tidak. Yang tidak terkait dengan tujuan bisa bersifat positif dan bisa negatif . oleh karena itu pendekatan goal free dalam melakukan evaluasi belajar, namun bisa diperoleh hasil lain yang berupa rasa percaya diri, kreatifitas, kemandirian, dan lain-lain.

Evaluasi sistem informasi atas siklus pendapatan adalah salah satu hal yang penting dalam semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam suatu badan usaha atau perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. System informasi pendapatan yang baik dan benar dapat memberikan manfaat bagi bandan usaha atau perusahaan itu sendiri dan masyarakat. Agar sistem informasi atas siklus pendapatan dapat berjalan dengan baik maka perlu evaluasi suatu mekanisme atau aturan yang baik pula. System informasi yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan .

Dari beberapa definisi diatas maka untuk lebih mudanya disimpulkan bahwa, evaluasi adalah keseluruhan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membuat keputusan program berdasarkan sajian informasi yang telah terkumpul. Dengan demikian evaluasi tersebut merupakan proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data yang kemudian dicoba membuat keputusan. Dalam melakukan evaluasi , evaluator pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan.

b. Tahap Evaluasi

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi

Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan

perlu dievaluasi. Tetapi umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factor*-nya.

2. Merancang kegiatan evaluasi

Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

3. Pengumpulan data

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

4. Pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan /rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

5. Pelaporan hasil evaluasi

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

2.1.2 Sistem

a. Definisi sistem

Menurut (Thomson 2003) sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen – komponen yang saling berkaitan (*interrelated*) atau sub system yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama(*common purpose*).

Sedangkan menurut Hansen dalam (Fitriasari 2000) sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan yang melakukan satu atau lebih proses untuk mencapai tujuan-tujuan khusus.

Menurut Mulyadi (2001) mendefinisikan system sebagai sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Thomson 2003) sistem informasi adalah sebuah serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai. System informasi menerima output, disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi.

Dari pengertian diatas telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan system yang pokoknya merupakan suatu sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu *input*, proses dan *output* dimana system tersebut harus terorganisasi, mempunyai hubungan, berintegrasi/ berpadu dan terpusatnya tujuan-tujuan.

b. Tujuan Sistem Informasi

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen

Kepengurusan merujuk ketanggungjawab manajemen untuk mengatur sumberdaya perusahaan secara benar. System informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumberdaya kepemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak menejemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

2 Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggungjawab dalam pengambilan keputusan

3 Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif .

c. Karakteristik Sistem

1. Sasaran.

Semua sistem pasti mempunyai sasaran atau yang biasa disebut sebagai tujuan dan biasanya sasaran suatu system berjumlah lebih dari satu, sehingga sasaran menjadi alat untuk memotivasi yang mengarahkan suatu system agar tidak melenceng ke sasaran/ tujuan yang lain.

2. Masukan-proses-keluaran.

Suatu sistem memerlukan input atau masukan untuk diproses yang akan menghasilkan output atau keluaran yang dibutuhkan para pengguna system tersebut.

3. Lingkungan .

Dalam suatu lingkungan system mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang memisahkan system dengan lingkungannya. Terkadang batasan batasan tersebut sukar ditetapkan secara pasti atau sukar dilihat.

4. Jaringan kerja sistem.

Jaringan kerja akan terbentuk apabila suatu system bergabung dengan system lainnya dengan kesamaan tingkat hirarki.

5. Subsistem.

Suatu sistem mengandung beberapa subsistem. Didalam system tersebut subsistem menjalankan tugas-tugas tertentu yang mengandung semua karakteristik dari satu sistem kompleks.

6. Saling ketergantungan

Suatu sistem karena memiliki subsistem- subsistem akan mengakibatkan ketergantungan dan saling berkaitan sebagai suatu bagian yang terintegral.

7. Pengendalian

Dalam mencapai sasaranya suatu system diharapkan mampu mengendalikan semua subsistemnya, pengendalian itu sendiri merupakan suatu proses regulasi atau pengaturan oleh system untuk mengoreksi setiap penyelewengan dari rangkaian langkah kearah sasaran yang telah ditetapkan.

8. Para pengguna.

Semua system pasti memiliki users atau para pengguna system yang membutuhkan system tersebut.

9. Kendala.

Kendala-kendala suatu system dapat berupa batasan-batasa intern ataupun ekstern yang akan menemukan kemampuan dari system tersebut.

d. Karakteristik Informasi

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas

perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Fahmi, 2011:26).

2.1.3 Pendapatan

a. Definisi pendapatan

Menurut Skosen (2010) pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas utama yang sedang berlangsung.

Niswonger (2006) berpendapat bahwa pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dan modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan

Menurut Nafarin (2006) pendapatan adalah arus masuk harta dari kegiatan perusahaan menjual barang dan jasa dalam suatu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Accounting Terminology bulletin No. 2 yang dikutip dalam buku Harapan (1999;39):Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada

equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. Dari pendapatan ini dapat disimpulkan bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan aset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal.

Dari beberapa definisi yang terdapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah kenaikan gross/kotor dari keuntungan ekonomi selama suatu periode dari aktivitas utama perusahaan yang menyebabkan kenaikan ekuitas tetapi bukan disebabkan dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pengakuan pendapatan secara umum adalah pendapatan merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan.

2.1.4 Pengertian BLUD

Badan Layanan Umum menurut Prof.Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt, Yanuar E. Restianto, S.E., M.Acc., Akt. Dan Drs. I Wayan Karman, M.Acc., Akt. Badan Layanan Umum di definisikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsi efisiensi dan produktivitas. Dari definisi tersebut terlihat pemerintah membuka ruang bagi dirinya untuk melakukan pelayanan public dengan tetap memperhatikan asas “value for Money”. Selain itu , diharapkan dengan BLU ini pemerintah memiliki badan yang mendahulukan tingkat kinerjanya dari segi produktifitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan . Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas yang berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Negara pada umumnya.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas . Badan Layanan Umum untuk tingkat daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Beberapa Akademi Keperawatan yang bersetatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai rasio kemandirian yang cenderung meningkat karena fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut sangat mendorong terciptanya lingkungan kondusif, mekanisme kerja efektif dan usaha yang produktif.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pada dasarnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Mahsun).

BLUD diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur yaitu :

1. Pasal 1 angka 23, pasal 68 dan pasal 69 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
2. PP No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
3. PP No. 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standard pelayanan minimal.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.07/PMK.02/2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU
5. Peraturan menteri keuangan no. 08/PMK 02 /2006 tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa pada BLU
6. Peraturan menteri keuangan no.09/PMK.02/2006 tentang pembentukan dewan pengawas pada BLU.
7. Peraturan menteri keuangan no. 10/PMK.02/2006 dan PMK No.73/PMK.05/2007 tentang pedoman penerapan remunerasi bagi pejabat pengelola dewan pengawas dan pegawai BLU.
8. Peraturan menteri keuangan no.66/PMK 0-2/2006 tentang tata cara penyusunan, pengajuan penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BLU.

9. Peraturan menteri keuangan no.109/PMK.05/2007 tentang dewan pengawas BLU.
10. Peraturan menteri keuangan No.119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
11. Peraturan menteri keuangan no.76/PMK 05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
12. Peraturan menteri dalam negeri no.61/tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-50 /PB 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pemeriksaan Negara bukan pajak (PNBP) oleh satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (PK-BLU).
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan no. Per-62/PB/2007 tentang pedoman penilaian usulan penerapan pengelolaan keuangan BLU.
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan no. per-67/PB/2007 tentang tata cara pengintegrasian laporan keuangan kementerian Negara/lembaga.

Untuk menjadi sebuah BLU maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur menurut bagian pertama pasal 4 PP no.23 Tahun 2005 :

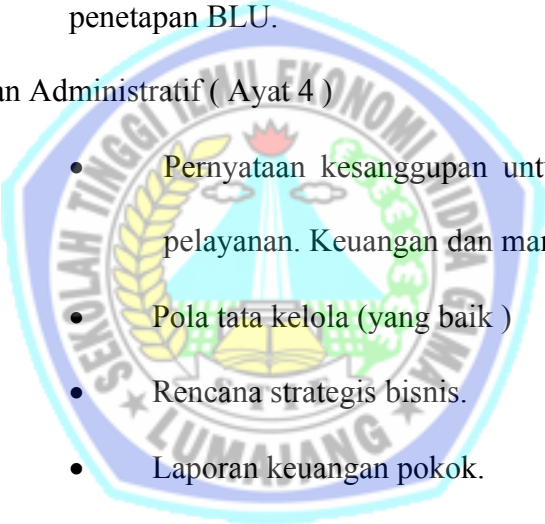
1. Persyaratan substantive (ayat 2) apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
 - Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum
 - Pengelolaan wilayah /kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan perekonomian masyarakat atau layanan umum dari/atau

- Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Persyaratan teknis (ayat 3) yaitu:

- Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana yang direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga /kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya .
- Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administratif (Ayat 4)

- 
- Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Keuangan dan manfaat bagi masyarakat.
 - Pola tata kelola (yang baik)
 - Rencana strategis bisnis.
 - Laporan keuangan pokok.
 - Standar pelayanan minimum

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen